

**FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK**

***FORMULATION OF REGULATIONS ON THE FUNCTION AND ROLE OF
NOTARIES IN ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

DISERTASI

Oleh :

MERRY KOESNADI

2007190011



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2023

**FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK**

***FORMULATION OF REGULATIONS ON THE FUNCTION AND ROLE OF
NOTARIES IN ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pada
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dan telah Dipertahankan di Hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka

Pada Hari : Rabu, 31 Mei 2023

Pukul : 10:00 – 12:00 WIB

Oleh

MERRY KOESNADI

NIM: 2007190011



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2023



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Merry Koesnadi
NIM : 2007190011
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul Formulasi Regulasi Fungsi Dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Doktor di Universitas lain, kecuali pada bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 5 Mei 2023

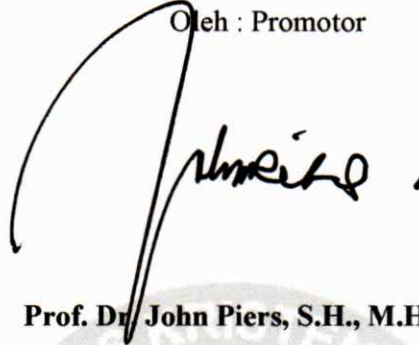


Merry Koesnadi
200719001

PERSETUJUAN

Disertasi ini telah disetujui pada tanggal 05 Mei 2023

Oleh : Promotor



Prof. Dr. John Piers, S.H., M.H., M.S.

NIP : 191690

Ko-Promotor 1



Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.

NIP : 981456

Ko-Promotor 2



Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H

NIP : 141104

LEMBAR PENGESAHAN

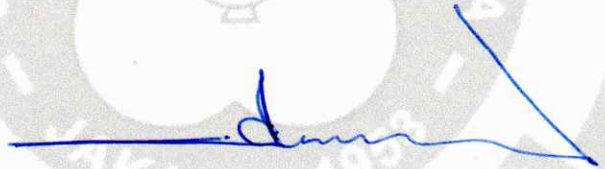
**FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK**

**FORMULATION OF REGULATIONS ON THE FUNCTION AND ROLE OF
NOTARIES IN ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Disertasi Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Disertasi Tahap II
(Terbuka) Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
Dan Diterima untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)
Pada tanggal 05 Mei 2023

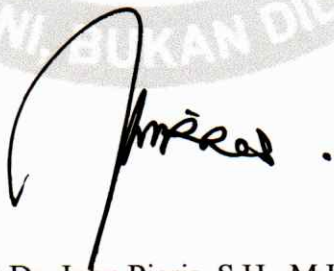
Susunan Dewan Penguji:

KETUA :




Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

SEKRETARIS :



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.

ANGGOTA :



1. Dr. Aartje Tehupeiori, S.H., M.H.



2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.



3. Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.



4. Prof. Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H.



5. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., M.B.A., MGT.

PENGESAHAN

Disertasi Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)
Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
Dan Diterima untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)
Pada tanggal 05 Mei 2023

Mengesahkan :
Universitas Kristen Indonesia



Direktur,



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA

NIP : 001473



Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Merry Koesnadi
NIM : 2007190011
Fakultas : Program Pascasarjana
Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : Formulasi Regulasi Fungsi dan Peran
Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara
Elektronik = *Formulation of Regulations on The Function and
Role of Notaries in Electronic General Meeting of Shareholders*

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapat gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
5 Mei 2023
Yang menyatakan



Merry Koesnadi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi bimbingan dan berkat kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul **“Formulasi Regulasi Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pengajar Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Edward Sirait, S.E selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia yang juga telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Kristen Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, S.Pd., PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
4. Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H. selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Indonesia sekaligus Promotor yang telah banyak membantu dan memberi dorongan sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan.

5. Ibu Dr. Aartje Tehupeiori, S.H., M.H. selaku Ko Promotor I yang telah dengan sabar selalu memberikan semangat, dorongan, dan juga kritik serta saran kepada Penulis demi kesempurnaan disertasi Penulis.
6. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ko Promotor II yang selalu sabar dan juga teliti dalam mengoreksi penulisan disertasi Penulis, sehingga disertasi Penulis dapat menjadi terstruktur dan sistematis.
7. Para pengajar pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia.
8. Para staf administrasi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia.
9. Notaris dan PPAT Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn dan para staf Notaris pada kantor Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn (Timur Aswindi, Ratna Tini dan Virgiawan Kabah) yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
10. Teman-teman mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen angkatan Pertama 2020 terkhusus untuk Almarhum Bapak Dr (c) Kheng Darmawan, S.H., M.H. yang telah memberikan support semasa hidupnya kepada Penulis.
11. Kedua orang tua Penulis, papah Erpi Koesnadi (Almarhum), mamah (Oey Peng Nio) dan kepada kakak-kakak, yang selalu mendoakan dan memberikan pengajaran dan bimbingan yang sangat baik kepada Penulis.
12. Kepada suami Penulis Dorma Haulian Sinaga, S.H., M.H, yang selalu membantu Penulis dalam mengerjakan tugas-tugas dari awal Penulis mengikuti kuliah Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia hingga sampai penulisan disertasi ini.

13. Kepada para senior Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu untuk doa yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Kiranya Tuhan Yesus Kristus dapat membalas kebaikan kepada semuanya dan Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu demi kesempurnaan tulisan ini, Penulis sangat mengharapkan segala masukan, kritik dan saran dari Pembaca. Semoga tulisan ini bisa memberi manfaat untuk peningkatan pelayanan hukum yang dilakukan oleh para Notaris di Indonesia.

Jakarta, Mei 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR).....	vii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	47
C. Tujuan Penelitian.....	48
D. Kegunaan Penelitian	48
E. Kerangka Pemikiran.....	50
F. Orisinalitas Penelitian	62
G. Metode Penelitian	66
1. Pendekatan Penelitian	66
2. Spesifikasi Penelitian	68
3. Jenis dan Sumber Data.....	69
4. Teknik Pengumpulan Data	72
5. Teknik Analisis Data.....	74
BAB II KEABSAHAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK.....	76
A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris.....	76
1. Pengertian Notaris.....	76
2. Syarat dan larangan menjadi Notaris	77
3. Tugas dan Wewenang Notaris	81
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	86
5. Kode Etik Notaris	90
6. Hubungan Notaris Dengan Para Pihak Penghadap.....	92
B. Tinjauan Umum Tentang Akta	96
1. Pengertian Akta	96
2. Syarat Pembuatan Akta	98
3. Macam-macam Akta	100

4.	Jenis-Jenis Akta Notaris	104
5.	Fungsi Akta	106
6.	Kekuatan Pembuktian Akta.....	108
7.	Tanggung Jawab Notaris Meliputi Kebenaran Materiil Sehubungan Dengan Akta Yang Dibuatnya.....	112
C.	Perseroan Terbatas.....	118
1.	Pengertian Perseroan Terbatas.....	118
2.	Pengaturan Hukum Perseroan di Indonesia.....	125
3.	Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	127
4.	Organ Perseroan.....	129
D.	Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	141
1.	Pengertian dan Fungsi Transaksi Elektronik.....	141
2.	Tanda Tangan Elektronik	144
3.	Dokumen Elektronik.....	146
4.	Konsep <i>Cyber Law</i>	147
5.	Konsep <i>Cyber Notary</i> Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	148
6.	Konsep <i>Cyber Notary</i> Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas	155
	Rangkuman Dan Analisis Teori	162

BAB III REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM RAPAT

	UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK.....	164
A.	Keabsahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik	164
1.	Regulasi Badan Usaha.....	164
2.	Rapat Umum Pemegang Saham Konvensional	171
3.	Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik	193
B.	Tidak diakuinya Regulasi Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik	205
1.	Fungsi dan Peran Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.....	205
2.	<i>Cyber Notary</i> dalam <i>Cyber Law</i> di Indonesia	215
3.	Fungsi dan Peran Notaris berkaitan dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik.....	232
C.	Kekuatan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik.....	246
1.	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik.....	246
2.	Alat Bukti	248
3.	Akta Otentik	250
4.	Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	259
5.	Kekuatan Hukum dan Pembuktian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik	264
6.	Urgensi Formulasi Regulasi tentang Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.....	266

Rangkuman Dan Analisis Teori	282
BAB IV KEKUATAN HUKUM CYBER NOTARY DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	284
A. Perkembangan Notaris Konvensional Dan Modern	284
B. Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Telekonferensi Dan Tandatangani Elektronik	286
C. Sertifikasi Transaksi Secara <i>Cyber Notary</i> Sah Atau Tidak Sebagai Akta Otentik.....	290
D. <i>Cyber Notary</i> Di Indonesia.....	299
E. Peraturan Perundang-Undangan <i>Cyber Notary</i> Di Negara <i>Civil Law</i> (Belgia Dan Perancis)	302
F. Rapat Umum Pemegang Saham Online (Teleconference).....	305
G. Pengaturan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik	307
H. Konflik Norma Dalam Pengaturan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik Terkait Dengan Kewajiban Notaris.....	310
I. Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik Apabila Notaris Tidak Memenuhi Kewajiban	311
J. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik Di Indonesia.....	312
K. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	315
L. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	321
Rangkuman Dan Analisis Teori	333
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	335
A. Kesimpulan.....	335
B. Saran	338
DAFTAR PUSTAKA	340
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	353

ABSTRAK

Judul Disertasi : **FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK**

Politik hukum di era perkembangan teknologi, membuat profesi hukum khususnya Notaris harus mengikuti perkembangan zaman. Seorang notaris dalam menjalankan posisinya sebagai Notaris memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pelaksanaan posisi tersebut. Notaris selaku pejabat umum/negara mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik. Notaris dalam menjalankan profesi diharuskan menyesuaikan dan mengikuti zaman, tujuannya agar dapat menghadapi tantangan Persaingan Global. Seiring dengan berjalannya waktu tentu saja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terus berkembang, sehingga ada sarana-sarana seperti jaringan internet dan media elektronik yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dua arah dan memungkinkan untuk saling melihat satu sama lain seperti *chatting*, *Teleconference* dan *video-conference*. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat dilakukan melalui *Teleconference*, mengingat efisiensi biaya dan waktu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hal yang dapat dilakukan melalui media telekonferensidiatur pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga memungkinkan para pemegang saham melakukan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa harus bertemu secara langsung dan berada satu tempat melainkan dapat dilaksanakan dengan telekonferensi yang memungkinkan para pemilik saham saling melihat serta berinteraksi aktif dalam rapat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan secara telekoferensi tidak sah karena melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan kehadiran secara fisik para pihak dalam proses penyusunan akta otentik sehingga kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut. Notaris dalam hal ini mempunyai peran dan fungsi yang berkaitan dengan *Cyber Notary*. Akta Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dengan *Cyber Notary* dan penandatanganannya boleh dan sah di lakukan karena di dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas sangat jelas di atur kemudian khususnya tandatangan mendapat perlindungan hukum yang di berikan Undang-Undang ITE namun *Cyber Notary* belum didukung penuh oleh perundang-undangan di Indonesia, walaupun terdapat kemungkinan tetapi tidak dapat dijalankan karena dibatasi oleh Undang-Undang yang lain, sehingga *Cyber Notary* belum dapat dilaksanakan secara sah di Indonesia. Masih di perlukan pengaturan yang spesifik mengenai *Cyber Notary* di Indonesia.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Notaris, dan RUPS Elektronik

ABSTRACT

Title Dissertation : FORMULATION OF REGULATIONS ON THE FUNCTION AND ROLE OF NOTARIES IN ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Legal politics in the era of technological development, makes the legal profession, especially Notaries, have to keep up with the times. A notary in carrying out his position as a notary utilizes the technology to facilitate the implementation of the position. Notary as a public official has the authority to make an authentic deed. Notaries ini carrying out the profession are required to adjust and follow the time, the aim is to be able to face the challenges of Global Competition. As time goes by, of course, Science and Technology continues to develop, so that there are facilities such as internet networks and electronic media that can be used for two-way communication and allow each other to see each other such as chat, Teleconference and video-conference. The implementation of the General Meeting of Stakeholders (GMS) can also be carried out by Teleconference, considering the cost and time efficiency. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas (Limited Liability Company) regulates what can be done through Teleconference media regulated in Article 77 paragraph (1) of Company Law so that it allows shareholders to conduct a GMS without having to meet in person and be in one place but can be carried out by Teleconference which allows the owners shares see each other and interact actively in meetings.

The Method used in normative juridicial research which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. The data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used to support secondary data legal out using qualitative juridicial analysis methods. From the research results it can be obtained that The GMS which is held by Teleconference is invalid because it violates the provisions in Article 16 Paragraph (1) letter m Undang-Undang Jabatan Notaris which requires the physical presence of the parties in the process of drafting an authentic deed so that the power of proof of the deed is under hand as a result of inappropriate actions with Article 16 Paragraph (1) letter m. Notaries in this case have roles and fuctions relation to Cyber Notary. The GMS deed were made with Cyber Notary and the signatory may be done because in Article 77 of the Company Law it is very clearly regulated then in particular the signature gets legal protection provided by law of Information and Electronic Transactions but the Cyber Notary has not been fully supported by legislation in Indonesia, although there are possibilities can not be run because it is limited by other laws, so the Cyber Notary cannot be implemented legally in Indonesia. There is still a need for specific arrangements regarding Cyber Notary in Indonesia.

Keywords : Limited Liability Company, Notary, dan Electronic GMS